

BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Demokrasi menjadi sebuah kecenderungan baru yang menggejala di Negara-negara di Asia Tenggara. Meskipun hanya sebagian kecil Negara yang demokratis, akan tetapi Negara-negara yang demokratis tersebut diharapkan mampu menjadi oase di tengah-tengah negara Asia Tenggara yang lain dimana mereka masih menjalankan kebijakan anti demokrasi.

Salah satu dari Negara di Asia Tenggara adalah Indonesia, meskipun Indonesia termasuk kelompok yang terakhir selepas dari cengkeraman otoritarian, kondisi negeri ini semakin tercabik-cabik. Daerah-daerah ingin melepaskan diri menjadi sebuah Negara sendiri. Dan pada saat runtuhnya pemerintahan otoritarianisme maka berita kerusuhan di Indonesia menjadi berita harian.

Salah satu peristiwa yang paling dramatis yang dialami Indonesia pada akhir abad kedua puluh adalah percepatan ke arah demokratisasi. Perubahan dan peralihan memang tidak nyaman. Tentu timbul banyak penderitaan yang berkaitan dengan lahirnya demokrasi baru ini. Meski begitu, semua hal berikut ini telah berlangsung pembukaan ruang politik yang menakjubkan, munculnya generasi baru masyarakat sipil, pembebasan ruang gerak media, dan juga adanya semangat positif untuk menuntut

.....

Kini semakin luas cakupan warga negara yang merasa dirinya sebagai mitra dan peserta aktif dalam tata pemerintahan di Indonesia. Untuk rakyat Indonesia, masa transisi demokratis ini adalah masa pembangunan suatu zaman baru, sekalipun terdapat banyak ketidakpastian. Semangat yang telah dibangkitkan oleh warga Indonesia untuk menanggapi berbagai tantangan yang mereka hadapi pantas membuat kami yang berada di komunitas internasional menaruh hormat.

Yang kemudian menjadi permasalahan adalah bagaimana suatu Negara beralih dari otoritarianisme menuju demokrasi. Pada satu bangsa yang sudah terbiasa dengan keteraturan. Peralihan menuju demokrasi merupakan hal yang mudah antara pihak yang pro dan anti demokrasi. Akan tetapi disuatu bangsa yang majemuk yang mempunyai sejarah perpecahan yang mengakar, peralihan menuju demokrasi memerlukan biaya yang sangat besar.

Jatuhnya Soeharto pada 1998 membangkitkan banyak harapan tentang demokratisasi di Indonesia, bagi warga negara dan digabungkan juga dengan harapan akan terjadinya pemulihan ekonomi berdasarkan kemenangan pasar bebas yang lepas dari penyakit kroniisme. Namun keprihatinan demi keprihatinan membawa kita kepada sebuah pertarungan apakah eksperimen demokrasi kita akan berakhir dengan kembalinya otoritarianisme?

Masih dalam suasana pertarungan penulis ingin mengetahui lebih jauh

101 Bagaimana Amalia Soeint dapat berperan sebagai pendorong

demokratisasi di Indonesia, dan bagaimana pula Indonesia dapat membangun demokratisasi dalam kondisi bangsa yang sedang berada pada masa transisi ini.

B. Latar Belakang Masalah

Pada umumnya ada kesepakatan bahwa arti demokrasi, yang berasal dari kata bahasa Yunani *demos* (rakyat) dan *kratos* (kekuasaan), adalah suatu keadaan dimana rakyat yang berada di posisi setara secara politik mengendalikan apa yang mereka anggap sebagai urusan publik dalam suatu masyarakat tertentu, seperti misalnya di Indonesia.¹ Orde baru sebagai suatu oligarki kapitalis khususnya pada masa puncak 1980-an hingga 1998 ketika hampir tidak ada tantangan yang berarti terhadapnya. Tahun-tahun itu dicirikan oleh munculnya suatu oligarki kapitalis yang menfungsikan kepentingan pemodal, politik dan birokratis dalam suatu koalisi yang menguasai aparat Negara secara instrumental.² Diskusi mengenai pembangunan demokrasi bukan hal baru untuk Indonesia. Apa yang sekarang disaksikan oleh negeri ini adalah kelanjutan dari sebuah dialog yang terhenti hampir empat dasawarsa oleh kekuasaan otoriter.

Jatuhnya Presiden Soeharto pada 1998 membuka kesempatan bagi berlangsungnya reformasi demokratis di Indonesia. Untuk membangun

¹ Olle Tornquist, at al; *Menjadikan Indonesia Bermakna; Masalah dan Pilihan di Indonesia*; DEMOS; Jl. Borobudur No.4 Jakarta 10320; November 2005. hal. 3

² A.E. Priyono, at al; *Gerakan Demokrasi di Indonesia Pasca-Soeharto*; DEMOS; PT Sembrani Aksara-Nusantara; Jakarta Desember 2003.

momentum demokratis, beberapa perubahan mendasar pada sistem politik telah dimulai melalui berbagai langkah yang bersifat sementara. Langkah-langkah ini termasuk membuat amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) untuk memperkuat peran parlemen, mensahkan peraturan baru tentang otonomi daerah yang telah diperluas baik ruang lingkungannya dan juga tingkat partisipasi politik di tingkat daerah/lokal, dan pembatasan masa jabatan presiden. Perubahan-perubahan ini membuktikan bahwa tuntutan-tuntutan reformasi dan demokrasi yang mendorong runtuhnya Orde Baru bukan semata-mata menuntut perubahan rezim tetapi juga perubahan sistem.

Pemenuhan tuntutan-tuntutan semacam ini membutuhkan perubahan menyeluruh pada semua institusi politik, sosial, dan ekonomi, dan juga perubahan pada basis hubungan antara rakyat dan negara, serta pendirian kerangka kerja yang stabil yang menjadi tempat berakarnya praktek-praktek demokratis.

Di era ini makinlah marak wacana-wacana yang mengembang dan terutama sekali mengenai demokrasi, uraian dan analisa mengenai demokrasi selalu menjadi polemik di masyarakat dunia. Akademisi dan para politisi saling beradu jargon, berkonfrontasi di areal perpolitikan yang berlabel demokrasi. Dalam hal ini sudah pasti mereka mengatas namakan rakyat, terlebih kaum perempuan dan anak-anak yang saat sekarang memiliki nilai jual yang tinggi untuk didiskusikan, adalah hal yang biasa.³

³ www.en.apc.org/dte/Aif2.htm

Melalui statemen maupun asumsi-asumsi para politisi dan akademisi itulah, bermunculan pemikiran yang inkonvensional dan sangat kontroversial tentang kaum perempuan dan anak-anak. Walaupun demikian, maraknya pemikiran-pemikiran tersebut tidak diimbangi dengan eskalasi demokratisasi di Indonesia. Entah karena demokrasi di Indonesia hingga sekarang masih mentabukan hal-hal demikian untuk diperbincangkan atau memang karena kehidupan konfigurasi politik Indonesia dengan konteks demokrasi belum mengadopsi wacana persamaan peluang karena implementasi nation character building yang tidak terrealisir karena demokratisasi di Indonesia.

Demokrasi dalam implementasinya berarti melebarkan pula akan persamaan peluang bagi setiap individu ataupun kelompok di dalam kehidupan berbangsa juga bernegara. Walaupun, cita-cita persamaan peluang tersebut memiliki tingkat kesulitan yang tinggi dalam mewujudkannya (bahkan utopis), tetapi haruslah tetap diusahakan. Cita-cita akan hal itu hingga kini belum pernah tercapai dengan optimal dikarenakan masalah yang mendasar, yaitu logika, tujuan, fisik dan kenyataan yang berbeda pada setiap bangsa maupun manusia.⁴

Perubahan yang terjadi di Indonesia masih sangat tidak signifikan meskipun pihak barat sendiri telah mengurangi dukungannya kepada rejim-rejim otoriter Amerika Latin ditahun delapan puluhan dan mereka sendiri mulai memperluas intervensinya dengan bendera hak asasi manusia (HAM)

dan Demokrasi sejak berakhirnya perang Dingin pada tahun 1989. Ternyata Indonesia adalah salah satu Negara yang mengalami perkecualian besar, bersama beberapa negara lain di Asia dan timur Tengah.⁵ Setelah krisis moneter dan politik melanda Asia pada 1997 dan 1998, yang kemudian diikuti periode “reformasi”, Indonesia dipandang oleh beberapa pengamat sedang memasuki suatu tahap transisi dari pemerintahan otoriter menuju sistem pemerintahan yang demokratis dengan civil society yang akan memainkan peran utama. Selain itu, transisi ini disertai pula dengan proses desentralisasi yang memberi tekanan pada otonomi daerah dan diharapkan membawa demokrasi akan lebih dekat kepada rakyat sekaligus menjadikan pemerintah lebih transparan. Namun beberapa pengamat lain menyanggah persepsi optimis tersebut seraya menguraikan transisi negatif dari “ketertiban menjadi kekacauan.”

Keruntuhan bangsa kuat Orde Baru secara mendadak mengejutkan banyak peneliti ahli Indonesia. Apa yang kelihatannya rezim kokoh tidak terkalahkan ternyata membuahkan suatu negara rapuh. Politik kedaerahan, agama, dan identitas etnis tumbuh semakin menguat. Runtuhnya rezim soeharto pada 1998 yang diikuti dengan meluasnya kebijakan desentralisasi meminta kita untuk mengubah titik perhatian dari pusat ke daerah serta mencampakkan konsep negara kuat dengan mengambil suatu model yang memberi ruang lebih luas bagi pemahaman akan pecahan-pecahan bentuk

pemerintahan.⁶ Indonesia berada dibelakang India dan Amerika Serikat, dalam posisi urutan ketiga sebagai negara demokrasi terbesar di dunia, sekalipun demokrasi ini masih belia. Kemunculan demokrasi ini berbarengan dengan jatuhnya rezim Soeharto pada tahun 1998. Dimana pada saat itu Indonesia mengalami suatu perubahan yang sangat besar. Dan Indonesia dalam situasi transisi ketika itu, karena Indonesia mengalami suatu perubahan dari sistem pemerintahan yang otoriter bergerak menuju sistem pemerintahan yang demokratis.

Bangsa Indonesia harus mendapatkan ilmu pengetahuan yang mapan dan pengetahuan dalam memfungsionalisasikan teknologi yang cukup, ilmu pengetahuan dan teknologi baru tidak dapat ditolak. Sedangkan, tuntutan demokratisasi saat ini lebih luas lagi dengan diimplementasikannya otonomi daerah, persamaan peluang bagi kelompok, individu, daerah, etnis dan lain sebagainya tidak dapatlah ditawar-tawar lagi. Minimal seluruh masyarakat, aparatur pemerintah dan negara memiliki fungsi sosial terhadap individu-individu dalam memberi motivasi untuk mencari pengetahuan yang dibutuhkan dan meraih yang dicita-citakan melalui kurikulum yang efektif dan bebas dari diskriminasi.

Transparansi sistem manajemen dan demokratisasi di Indonesia nampaknya masih perlu desakan dari faktor Internasional. Sebagaimana yang dikatakan Amien Rais pada menteri Luar Negeri Amerika, Madeline Albright bahwa ia mengharapkan intervensi moral Amerika terhadap

⁶ <http://www.kompas.com>

Indonesia.⁷ Hal tersebut dimaksudkan supaya jika Jakarta tidak bisa menyelesaikan peristiwa berdarah dimana-mana, maka Jakarta mungkin akan menghadapi konsekuensi Barat.

Pada dasarnya Indonesia masih sangat lemah untuk menjadi negara yang demokratis, karena selain keadaan perekonomiannya masih sangat lemah sistem pemerintahan di Indonesia masih belum jelas. Kehidupan Indonesia sendiri masih sangat tergantung dengan negara lain terutama AS. Kebijakan-kebijakan yang telah diberikan oleh AS terhadap Indonesia sudah cukup banyak, seperti misalnya bantuan yang di berikan oleh AS dalam bidang pendidikan yang diberikan oleh AS melalui *The Asia Foundation*. The Asia Foundation adalah organisasi nirlaba dan nonpemerintahan yang mempunyai komitmen yang tinggi terhadap pengembangan Asia Pasifik yang damai, sejahtera, dan terbuka. AS juga memberikan dukungannya dalam bidang *penegakan HAM*, karena menurut AS pelanggaran HAM di Indonesia melibatkan satuan keamanan, sehingga AS memfokuskan upaya-upaya dalam penegakkan HAM di Indonesia dengan cara melakukan kerjasama dengan LSM-LSM seperti salah satu diantaranya yang diberi bantuan oleh AS terhadap ELSAM. ELSAM disini merupakan sebuah lembaga yang bergerak dalam bidang studi dan advokasi masyarakat dengan mendapatkan dana bantuan dan tenaga profesional dari AS guna mengembangkan mutu dan system pendidikan di Indonesia, serta membantu ELSAM untuk lebih sering lagi dalam menangani segala permasalahan yang

menyangkut HAM di dalam masyarakat Indonesia.⁸ Selain itu, AS juga melakukan kerjasama dengan Organisasi Buruh Internasional dan pusat Solidaritas (ACILS) untuk meningkatkan kesadaran dan perang melawan perburuhan anak-anak di Indonesia. Amat sulit diingkari bahwa pada tahap percobaan kita berdemokrasi sekarang ini telah banyak terjadi kekeliruan. Dalam kehidupan masyarakat, kekeliruan itu hingga tingkat tertentu telah sampai kepada tahap yang amat mengkhawatirkan. Karena itu kita bicara tentang adanya krisis yang mengancam kehidupan bangsa.

Untuk membangun pemerintahan yang demokratis sangatlah penting ada jaminan satu akses yang memungkinkan keterlibatan dan keikutsertaan masyarakat dalam proses-proses pembuatan keputusan. Sebuah masyarakat sipil yang kuat adalah satu prasyarat bagi demokrasi yang kuat, sekalipun diakui bahwa demokrasi mengizinkan berdirinya pengelompokan dan organisasi-organisasi yang memiliki ide dan sikap yang justru bertentangan dengan perdamaian, toleransi, dan prinsip-prinsip demokrasi itu sendiri.

Memperhatikan pengecualian ini, sangatlah perlu untuk memperbaiki kapasitas masyarakat sipil dengan memperbaiki peran, fungsi, dan posisi organisasi-organisasi masyarakat sipil di Indonesia. Sebagai tambahan, struktur resmi pembuatan keputusan harus diperbaiki dengan memperkuat alat-alat pembuatan keputusan baik yang sudah ada maupun yang tradisional, dan dengan memperhatikan sepenuhnya aspirasi rakyat. Jika selama Orde Baru kelompok-kelompok masyarakat sipil muncul sebagai “oposisi alami”,

⁸ Ibid. A. P. N. ...

dengan runtuhnya Orde Baru dan bangkitnya kembali partai politik berbasis massa, organisasi-organisasi masyarakat sipil kehilangan tempat, menjadi tersesat dalam pencarian mereka terhadap peran dan identitas baru bagi mereka sendiri, pada saat maraknya pembentukan organisasi-organisasi baru.

Sebuah masyarakat sipil yang kuat dan partisipatif adalah komponen terpenting demokrasi. Tetapi di Indonesia, seperti yang disaksikan di negara-negara lain yang menjalani demokratisasi, penting memastikan organisasi-organisasi masyarakat sipil tetap di wilayah masyarakat (publik), bekerja untuk mencapai tujuan-tujuan yang tidak membahayakan keamanan dan keselamatan kelompok lain. Buat banyak orang, mereka juga harus dibimbing oleh contoh, memberikan model peran untuk pemerintah maupun partai politik, di dalam diri mereka sendiri, yang di jiwa mereka sendiri, sering dianggap sebagai lembaga-lembaga ataupun organisasi-organisasi yang terlepas dari massa.

Komitmen awal para pendiri Republik Indonesia, seperti yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, adalah menciptakan bangunan politik demokrasi yang representatif dan pluralistis, sesuai dengan nilai "keadilan sosial", "kesejahteraan rakyat" dan "kemanusiaan". Namun, pengalaman Indonesia dengan pemerintahan demokratis berjalan singkat. Kegagalan pemerintahan pasca-kemerdekaan untuk menjalankan stabilitas ekonomi dan politik memicu rasa kecewa dan membuka jalan bagi pengekan politik di bawah Demokrasi Terpimpin

Baru, kekuatan politik rezim ditopang oleh dukungan militer, dan masyarakat menerima pengekangan politik demi pembangunan ekonomi dan stabilitas.

Pemindahan kekuasaan pada waktu kemerdekaan tidak disertai oleh pembentukan sebuah pemerintahan demokratis yang kuat. Akibatnya, budaya politik di Indonesia berkembang di sebuah lingkungan yang tak mengenal praktek-praktek, pranata-pranata, dan proses-proses demokratis. Akibatnya pula, hanya ada sedikit modal politik dewasa ini yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat dan membangun kerangka bagi masa depan. Pengalaman politik Indonesia adalah pemerintahan eksekutif yang berkuasa, dengan dukungan militer, berhadap-hadapan dengan lembaga legislatif yang tidak efektif dan lemah. Selama pemerintahan Presiden Soeharto, begitu banyak upaya dikeluarkan untuk membangun suatu "negara yang kuat".

Tetapi di dalam prosesnya, perhatian dan kepekaan kelompok-kelompok etnis dan keagamaan dilupakan. Banyak kelompok dan wilayah menderita karena kurang menikmati pembangunan, termasuk wilayah-wilayah yang kaya sumber daya alam. Bila ada protes yang bersifat lokal, kerap itu dihadapi dengan kekerasan. Dalam beberapa kasus, sejarah pelanggaran hak asasi yang mengancam kini menimbulkan tuntutan pemisahan diri. Dalam banyak kasus, kerusakan lingkungan dan habisnya sumber daya yang tak dapat diperbaharui semakin memiskinkan komunitas-komunitas itu. Apa lagi, protes-protes lokal dihadapi dengan kekerasan, sehingga kelompok-kelompok mengarah pada tuntutan-tuntutan memisahkan diri, karena sejarah yang kelam dan pelanggaran hak asasi manusia.

kompetitif dalam rangka memperoleh suara rakyat. Definisi ini mengandung dua unsur yaitu liberalisasi dan partisipasi yang menurut Robert A Dahl merupakan hal yang menentukan bagi demokrasi atau polyarchi.¹⁰

Bagi Robert A Dahl, demokrasi itu adalah suatu sistem politik dimana para anggotanya saling memandang antara yang satu dengan yang lainnya sebagai orang-orang yang sama dipandang dari segi politik, dan mereka itu secara bersama-sama adalah berdaulat, dan memiliki segala kemampuan, sumber daya, dan lembaga-lembaga yang mereka perlukan demi untuk memerintah diri mereka sendiri.¹¹

Definisi demokrasi secara ideal, demokrasi merupakan suatu sistem politik dimana semua warga negara memiliki hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilu yang diadakan secara berkala dan bebas secara efektif menawarkan peluang kepada penduduk untuk mengganti elit yang memerintah dengan yang lainnya. Suatu "polity" dimana semua warga negara menikmati kebebasan bicara, kebebasan untuk berorganisasi dan memperoleh informasi. Hak yang sama di depan hukum serta menjalankan agama yang dipeluknya.¹²

Menurut Huntington, demokrasi dapat berjalan dalam empat hal¹³, yaitu:

¹⁰ Samuel P. Huntington, *Gelombang Demokratisasi Ketiga*, PT. Pustaka Utama graffiti, Jakarta 1995. Hal.6

¹¹ Robert A Dahl, *Demokrasi dan para Pengkritiknya*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta 1992.

Hal. XXVIII

¹² Samuel P. Huntington, "Demokrasi dan Kekuasaan" *Jurnal Pustaka* 1996, hal. 64

- Dengan cara dimana elit yang berkuasa memelopori proses perwujudan demokrasi
- Dengan cara pergantian (Replacement), dimana kelompok oposisi memelopori proses perwujudan demokrasi dan rejim otoriter tumbang atau digulingkan.
- Dengan cara Transplacement dimana proses demokratisasi merupakan hasil tindakan bersama kelompok pemerintahan dan kelompok oposisi.
- Dengan cara intervensi yaitu proses demokrasi akibat intervensi pihak luar atau asing dengan menjatuhkan rejim otoriter.

Dalam demokrasi berjalan beberapa tahapan. Pertama tahap transisi.

Dalam hal tahap ini terjadi kombinasi diantara beberapa hal, yaitu : kritisme dan perlawanan dari luar rejim, rejim mengalami perpecahan internal, angkatan bersenjata mengalami perpecahan atau perubahan orientasi politik, rejim menghadapi krisis ekonomi atau politik yang semakin sulit dikelola dan tuntutan semakin kuat. Kedua tahap liberalisasi awal. Dalam tahap ini yang terjadi adalah jatuh atau berubahnya rejim lama, meluasnya hak-hak politik rakyat, terjadinya ketidaktertataan pemerintah, terbentuknya ketidakpastian dalam banyak hal, dan terjadinya ledakan partisipasi politik diantaranya dilaksanakannya pemilu yang demokratis dan pergantian pemerintah sebagai konsekuensi dari hasil pemilu.+-

Sesuai dengan tahapan di atas, Indonesia yang tengah menuju

dan melalui pada tahap pertama yaitu tahap transisi. Dimana pada tahap ini

ditandai dengan perlawanan yang dilakukan oleh gerakan mahasiswa tetapi ada juga faktor-faktor lain yang ikut mendorong Presiden Soeharto lengser. Ketika ada tuntutan reformasi dari kalangan mahasiswa, kalangan ABRI yang tidak setuju terhadap Presiden Soeharto memberikan dukungan terhadap gerakan mahasiswa. Dan pada tahapan ini juga terjadi suatu gelombang krisis moneter dan krisis ekonomi rakyat yang menuntut reformasi total.

Pada tahap kedua yaitu jatuhnya rejim otoriter. Bulan Mei 1998. ketika Soeharto menyatakan diri berhenti sebagai Presiden. Karena Soeharto dianggap sebagai tulang punggung penopang otoritarianisme dengan segala perangkat politik yang diciptakannya, maka lengsernya Soeharto dapat dikatakan sebagai babak terakhir sebagai sebuah rejim otoriter di negeri ini.

Teori demokrasi ini akan penulis tuangkan pada BAB II .

Teori Politik Luar Negeri

Politik luar negeri sebagai salah satu sarana untuk melakukan eksplanasi teoritik yang komprehensif dalam memahami perilaku politik Amerika Serikat dalam mendukung proses demokrasi di Indonesia. Penggunaan teori ini diharapkan dapat menjelaskan fenomena-fenomena yang terjadi antara hubungan diplomatik Amerika Serikat-Indonesia yang secara keseluruhan hal tersebut berkaitan dengan kepentingan nasional.

Bagaimanapun luasnya penelaahan terhadap perilaku luar negeri Amerika Serikat di Indonesia, tetap pada batasan bahwa politik luar negeri

merupakan suatu tindakan yang terencana dan sudah diperhitungkan minimal dan maksimalnya tentang untung rugi dan baik buruknya. Suatu mekanisme bagi suatu politik untuk beradaptasi dengan lingkungan geopolitik dan untuk mengendalikan lingkungan itu demi mencapai tujuannya.¹⁴

Politik luar negeri menurut Jack C. Plano dan Roy Olton sebagai berikut :

Foreign Policy is a strategy or planned course of action developed by the decision makers of a state vis a vis other states or international entities, aimed at achieving specific goals defined in terms of national interest.

Jadi politik luar negeri adalah strategi atau tindakan terencana yang dikembangkan oleh para pembuat keputusan, yang ditujukan untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan tujuan nasionalnya, politik luar negeri meliputi proses yang dinamis dalam menetapkan interpretasi yang relatif mantap terhadap kepentingan nasionalnya dalam menghadapi faktor-faktor situasional yang sering berubah dilingkungan internasional. Proses ini untuk mengembangkan tindakan-tindakan yang diikuti oleh usaha-usaha untuk mencapai pelaksanaan garis-garis kebijakan luar negerinya. Tujuan politik luar negeri untuk mewujudkan tujuan, cita-cita nasional serta mamatuhi kebutuhan utama suatu negara. Politik luar negeri merupakan langkah nyata guna mencapai, mempertahankan, dan melindungi kepentingan nasional negara itu sendiri.

Democracy and respect for human rights have long been central components of U.S. foreign policy. Supporting democracy not only promotes such fundamental American values as religious freedom and worker rights, but also helps create a more secure, stable, and prosperous global arena in which the United States can advance its national interests.

¹⁴ T. dan W. (1990). *Teori-teori Politik Luar Negeri: Relevansi dan Keterbatasanannya*. Bogor: Pustaka

*In addition, democracy is the one national interest that helps to secure all the others. Democratically governed nations are more likely to secure the peace, deter aggression, expand open markets, promote economic development, protect American citizens, combat international terrorism and crime, uphold human and worker rights, avoid humanitarian crises and refugee flows, improve the global environment, and protect human health.*¹⁵

(Pernyataan dari; Under Secretary for Democracy and Global Affairs; Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor)

Demokrasi dan hak asasi manusia merupakan suatu bagian terpenting dari politik luar negeri AS. Dukungan yang diberikan untuk kemajuan demokrasi, AS tidak hanya memberikan dukungannya dalam memberikan kebebasan untuk memeluk salah satu agama dan menjalankan suatu keadilan, tetapi juga membantu suatu negara menjadi lebih terjamin, stabil, dan sejahtera sehingga AS juga dapat memajukan kepentingan nasionalnya. Dalam usaha untuk mencapai tujuannya, demokrasi merupakan salah satu tujuan nasional yang dianggap dapat memberikan keamanan bagi seluruh rakyat. Dalam hal ini dijelaskan bahwa jika di dalam suatu negara yang menjalankan sistem demokrasi maka Negara tersebut akan menjadi aman dan damai, terhindar dari agresi (penyerangan), dan dapat mengembangkan perdagangan bebas, meningkatkan perekonomian, mensejahterakan penduduk, terhindar dari serangan teroris dan tindak kejahatan ditingkat internasional, serta dapat menegakkan hak asasi manusia dimana hal tersebut dapat melindungi warga negara dari tindak kekerasan, memperbaiki hubungan dunia dan memberikan jaminan kesehatan bagi seluruh

The Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor (DRL), adalah merupakan sebuah lembaga yang bekerja untuk menjalankan, mendukung dan meningkatkan program demokrasi di seluruh dunia. DRL memiliki tanggung jawab dalam mengawasi the Human Rights and Democracy Fund (HRDF). Dahulu DRL adalah merupakan salah satu lembaga yang menghasilkan sumber penghasilan bagi HRDF, karena DRL merupakan salah satu lembaga yang menyediakan dana untuk demokrasi di daerah-daerah dimana dana-dana tersebut dipergunakan untuk mendukung program demokratisasi dengan melakukan pengawasan yang ketat terhadap pemilihan umum dan pembangunan parlement.¹⁶

Teori Politik Luar Negeri ini akan diaplikasikan oleh penulis dalam bab III (tiga).

F. Hipotesa

AS mendorong proses demokratisasi di Indonesia karena merupakan bagian dari tema sentral politik luar negeri AS. Demi keberhasilan dari tujuan politik luar negarinya tersebut, maka AS memberikan beberapa bantuan terhadap Indonesia diantaranya dalam bidang pertahanan melalui E-IMET, melalui bidang pendidikan The Asia Foundation AS memberikan dukungannya, serta AS juga melakukan kerjasama dengan LSM-LSM di Indonesia dan organisasi Internasional dan solidaritas (ACILS) dalam upaya penegakan HAM.

G. Jangkauan Penelitian

Agar tidak terjadi pembahasan yang terlalu meluas, maka penelitian ini hanya menyoroiti masalah peran Amerika Serikat dalam mendorong demokrasi di Indonesia sejak runtuhnya rezim Orde Baru atau Pasca Pemerintahan Soeharto 1998-2004.

H. Metode Penelitian

Dalam melakukan pencarian data penulis menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dan analitis. Model ini berusaha menggambarkan kenyataan dan situasi berdasarkan kenyataan yang ada dan didukung oleh teori yang digunakan dengan tujuan dapat menggambarkan penelitian secara tepat, keadaan dan gejala tertentu. Selain itu juga penulis menggunakan metode studi kepustakaan dalam pengumpulan data melalui literatur yang tersedia baik berupa buku, surat kabar maupun internet yang berkaitan dengan pokok permasalahan.

I. Sistematika Penulisan

BAB I: Berisi tentang Pendahuluan yang menjelaskan tentang Latar Belakang Masalah, Tujuan Penelitian, Rumusan Masalah, ~~Kerangka Dasar Teori~~ Hipotesis, ~~Jangkauan Penelitian~~ Metode

Penelitian dan Sistematika penulisan yang akan memberi gambaran mengenai topik yang akan dibahas.

BAB II : Dalam Bab ini akan menjelaskan mengenai sejarah perkembangan demokrasi Indonesia melalui masa transisi dari rezim otoriter.

BAB III: Bab ini akan menjelaskan tentang gambaran umum mengenai karakteristik politik luar negeri AS, serta kebijakan AS dalam mendukung proses demokratisasi di Indonesia

BAB IV : Di dalam Bab ini akan memaparkan tentang Kepentingan AS terhadap proses demokratisasi di Indonesia, dalam bidang ekonomi, militer, pendidikan dan politik

BAB V : Bab ini akan membahas tentang kesimpulan dari pokok-pokok